



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 21 Agustus 2019

Halaman: 1

DUA RUANG DISEGEL KPK
Pengawasan Aparat Diperkuat

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X prihatin atas tertangkapnya oknum jaksa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas kejadian ini, ada introspeksi bagi seluruh pihak agar kejadian serupa tidak terulang lagi di wilayah DIY.

"Saya berharap bisa ditangani dengan baik karena masalah pidana ya pidana. Kalau saya harapannya jangan sampai terjadi lagi di DIY. Mudah-mudahan OTT ini yang pertama dan terakhir lah. Selain itu, saya minta Pemkot bisa melakukan kontrol betul pada aparatnya," tegas Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Selasa (20/8).

* Bersambung hal 7 kol 5

Pengawasan

Sultan mengungkapkan, OTT yang dilakukan KPK pasti memiliki dasar hukum kuat jadi harus dihormati seluruh pihak. Sultan berharap permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik dan tidak terulang lagi di DIY.

Dalam kesempatan itu, Sultan sempat menyoroti kinerja Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). "TP4D itu kan pengawas, supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Tapi kalau pengawasnya sendiri begitu kan bagi saya ini dagelan," ungkap Sultan.

Wali kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, mengaku pihaknya akan menghormati proses hukum yang berjalan. Dirinya pun masih menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait kasus yang ditangani di wilayah Kota Yogya. Pemkot Yogya menjadi keprihatinan. Pemkot akan memperkuat pengawasan serta menjamin semua proyek fisik harus tetap berjalan karena berkaitan kepentingan masyarakat. "Sampai saat ini kami baru mengetahui dari pemberitaan. Tentu saya prihatin. Ini menjadi suatu pengingat, dan harus paham bahwa jangan bermain-main dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme karena sudah ada pakta integritas," tandasnya, Selasa (20/8).

Dirinya juga meminta Bagian Pengendalian Pembangunan dan Inspektorat untuk memperkuat pengawasan. Seluruh proyek fisik juga harus tetap berjalan agar kepentingan masyarakat tidak terganggu. ASN di lingkungan Pemkot Yogya pun diminta tenang serta memberikan pelayanan seperti biasa. Dalam proses pengawasan, setiap proyek fisik dievaluasi selama tiga bulan. Terutama menyangkut capaian pekerjaan serta realisasi anggaran.

Pasca OTT, KPK menyegel kantor kontraktor Kusuma Tandira Contractor di kawasan perumahan Fajar Indah Permata II No 18 Desa Baturan, Colomadu, Karanganyar. "KPK memang minta izin untuk memeriksa empat tersangka di Mapolresta Solo, namun kasusnya apa kami tidak tahu," ujar Wakapolresta Solo AKBP Andy Rifal yang dihubungi KR, Rabu (20/8). (Ria/DhiHwa)-1

Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Dinas PUPKP			
4. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005